

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Sebelumnya

Penelitian yang dilakukan oleh (Luh dkk., 2022) menggunakan metode kuantitatif. Sampel penelitian ini ditentukan dengan teknik *purposive sampling* sehingga diperoleh sampel sejumlah 11 perusahaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kinerja lingkungan, pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, biaya lingkungan dan aktivitas lingkungan berpengaruh terhadap kinerja keuangan baik dengan proyeksi ROA (*Return on Assets*) maupun ROE (*Return on Equity*).

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh (Maysihella, 2019), sampel ditentukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dengan kriteria yang ditentukan, maka jumlah sampel yang diperoleh adalah 29 perusahaan manufaktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa *green accounting* berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan dengan ROA dan berpengaruh signifikan terhadap profitabilitas ROE.

Penelitian yang dilakukan oleh (Silitonga, 2020) dengan sampel yang didapatkan 28 perusahaan pertambangan yang terdaftar di BEI pada tahun 2013 sampai 2017. Hasil analisis menunjukkan bahwa dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan.

Penelitian juga dilakukan oleh (Suryanto, 2019) dengan sampel yang dipilih sebagai objek penelitian adalah 45 perusahaan disetiap periode penelitian yaitu 2015-2017. Hasil penelitian menyatakan bahwa komite audit, independensi dewan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan perusahaan secara simultan.

Tabel 2.1
Perbedaan
Penelitian Terdahulu dengan Penelitian Sekarang

No	Peneliti	Metode	Substansi	Variabel	Perbedaan
1	Luh, Ni Hadriyani, Intan Wayan, Ni Dewi, dan Yulianita (2022)	regresi linier berganda	Kinerja keuangan	kinerja lingkungan (x_1), pengungkapan lingkungan (x_2), produk ramah lingkungan (x_3), biaya lingkungan (x_4) dan aktivitas lingkungan (x_5)	pengungkapan lingkungan, produk ramah lingkungan, biaya lingkungan, aktivitas lingkungan, dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit
2	Putri Mayshellia (2019)	regresi linier berganda	Kinerja keuangan	Green accounting (x_1) dan kinerja lingkungan (x_2)	dewan direksi, dewan komisaris, dan komite audit
3	Merry Kristina Silitonga (2020)	regresi linier berganda	Kinerja keuangan	dewan direksi (x_1), dewan komisaris (x_2), dan komite audit (x_3)	<i>Green accounting</i>
4	Agus Suryanto (2019)	regresi linier berganda	Kinerja keuangan	komite audit (x_1), independensi dewan (x_2), kepemilikan institusional (x_3), dan kepemilikan manajerial (x_4)	Independensi dewan, kepemilikan institusional, kepemilikan manajerial, dewan direksi, dewan komisaris, dan <i>Green accounting</i>

Sumber : Berbagai Jurnal yang Dipublikasikan

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Teori Keagenan (*Agency Theory*)

Teori keagenan menurut (Jensen, M. C., & Meckling, 1976:305) adalah “suatu kontrak di bawah satu atau lebih yang melibatkan agent untuk melaksanakan beberapa layanan bagi mereka dengan melakukan pendelegasian wewenang pengambilan keputusan kepada agent”.

Dalam konteks organisasi bisnis, terdapat suatu interaksi antara pihak-pihak yang ada dalam perusahaan dapat dikategorikan kedalam dua kelompok besar yakni prinsipal dan agen. Dalam konteks organisasi bisnis, prinsipal mewakilkan kepentingan kepada agen untuk mengelola sumber dayanya sedemikian rupa. Hubungan ini menghasilkan ikatan antara principal dan agen yang disebut kontrak keagenan (*agency contract*). Singkatnya, agen diberi kompensasi atas jasa manajerial entitas sebagai bentuk dana dan kepentingan yang diwakilkan oleh prinsipal.

Menurut (Scott, 2015), karakteristik dari kontrak keagenan membawa suatu inherent *risk* (risiko melekat) di mana secara logis prinsipal tidak dapat selalu mengawasi atau memastikan tindakan yang dilakukan agen. Hal ini berimbas pada hadirnya konflik dari kontrak keagenan tersebut (*agency conflict*). Konflik tersebut yakni adanya asimetri informasi.

Asimetri informasi merupakan perbedaan perolehan informasi antara prinsipal dengan agen di mana secara logis, menempatkan agen sebagai pihak yang memiliki informasi lebih banyak dibandingkan prinsipal (Reza, 2020).

Agency cost merupakan pengeluaran waktu dan uang yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengurangi masalah keagenan. Menurut (Jensen, M. C., &

Meckling, 1976) dalam (Mulyati, 2021), *agency cost* merupakan penjumlahan: (1) pengeluaran monitoring oleh prinsipal, (2) pengeluaran “bonding” oleh agen, dan (3) kerugian residual. Semakin besar perusahaan, semakin besar pula *agency cost*-nya karena meningkatnya kebutuhan monitoring dalam perusahaan besar.

Namun, *agency cost* dapat dikurangi dengan meningkatkan level kepemilikan manajemen supaya mengurangi biaya monitoring. *Agency cost* yang lebih rendah diasosiasikan dengan nilai perusahaan yang semakin tinggi. Alternatif untuk mengurangi *agency cost* yaitu melalui mekanisme pengendalian internal dan mekanisme pengendalian eksternal atau pengendalian pasar.

Mekanisme pengendalian internal didesain untuk menyamakan kepentingan antara manajer dengan pemegang saham. Menurut (Jensen, M. C., & Meckling, 1976) pada (Reza, 2020) ada beberapa cara yang dilakukan untuk mengurangi *agency cost* yaitu: pertama dengan meningkatkan kepemilikan saham perusahaan oleh manajemen karena dengan hal itu manajer merasakan langsung manfaat dari keputusan yang diambil. Kedua dengan meningkatkan *dividen pay-out ratio*, dengan demikian tidak tersedia cukup banyak *free cash flow*. Ketiga dengan meningkatkan pendanaan dengan hutang, keempat melalui institusional investor sebagai *monitoring agents*.

2.2.2 Teori Legitimasi

Menurut (Deegan, C. and Rankin, 1996:55), mengemukakan tentang bagaimana memberikan gambaran tentang adanya perbedaan antara nilai-nilai yang dianut perusahaan dengan nilai-nilai masyarakat, maka perusahaan akan berada pada posisi terancam dimana perbedaan tersebut dikenal sebagai *Legitimacy Gap*.

Legitimasi gap akan muncul apabila perusahaan tidak peka terhadap dampak yang mungkin ditimbulkan dari aktivitas perusahaan serta harapan masyarakat terhadap perusahaan dan hanya berorientasi pada menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya (Widhiastuti & Saputra, 2017).

Teori legitimasi berfokus pada hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang didasari oleh kontrak sosial yang terjadi antara perusahaan dengan masyarakat (Adil, M,& Winarsih, 2019). Penerapan *green accounting* merupakan upaya perusahaan untuk melegitimasi keberadaannya di masyarakat sekitar. Perusahaan yang menerapkan *green accounting* memiliki sudut pandang bahwa biaya yang dikeluarkan untuk sosial dan lingkungan merupakan aset yang akan memberikan manfaat dalam aspek ekonomi di masa yang akan datang.

Pengungkapan biaya lingkungan akan meningkatkan citra positif perusahaan karena menandakan bahwa perusahaan peduli akan lingkungan sekitarnya. Sehingga aspek ini dapat menjadi informasi tambahan bagi investor untuk pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi selain informasi laba perusahaan. Semakin banyak investor yang tertarik untuk menginvestasikan dananya di perusahaan tersebut maka akan meningkatkan kinerja keuangan dan harga saham perusahaan (Sparta, 2022).

2.2.3 Teori *Stakeholder*

Menurut pendapat (Deegan & Craig, 2004:292), *stakeholder* adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Semua perusahaan dituntut untuk selalu menjamin dan menghargai hak dan kepentingan berbagai pihak, jadi perusahaan bukan hanya entitas yang beroperasi untuk memenuhi kepentingannya sendiri, namun juga harus

memberikan manfaat bagi *stakeholder*. Hubungan *stakeholder* dan perusahaan adalah saling bergantung.

Stakeholder membutuhkan perusahaan dan begitu sebaliknya. *Stakeholder* membutuhkan perusahaan untuk memenuhi kepentingannya, sementara perusahaan membutuhkan *stakeholder* untuk mencapai keberhasilan dan menjaga kontinuitas perusahaannya (Meiyana, 2018).

Menurut (Ladyve, G. M., Ask, N. S., & Mawardi, 2020) Suatu perusahaan sangat dipengaruhi oleh dukungan yang diberikan oleh *stakeholder*, sehingga aktivitas perusahaan adalah untuk mencari dukungan tersebut. Teori *stakeholder* ini lebih mempertimbangkan posisi para *stakeholder* yang dianggap *powerfull*. Kelompok *stakeholder* inilah yang menjadi pertimbangan utama bagi perusahaan dalam mengungkapkan dan/atau tidak mengungkapkan suatu informasi di dalam laporan keuangan.

Menurut (Sparta, 2022), teori *stakeholder* mendasari dalam pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* dan masyarakat sekitar yang diungkapkan pertama kali oleh Freeman pada tahun 1983.

Menurut (Egbunike, A & Okoro, 2018), teori *stakeholder* menggambarkan kegiatan tertentu yang dilakukan oleh manajemen perusahaan dapat dipertahankan tanpa merusak kepentingan pemilik sumber daya dan lingkungan.

Dengan demikian kepentingan *stakeholder* tidak dapat dilanggar untuk mempertahankan hubungan baik. *Stakeholder* memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi penggunaan sumber ekonomi perusahaan guna menjalankan aktivitas usahanya.

2.2.4 *Green Accounting*

Menurut (Cohen, N., 2011) mengemukakan bahwa *green accounting* adalah sebagai berikut :

“A style of accounting that includes the indirect costs and benefits of economic activity – such as environmental effects and health consequences of business decisions and plans.”

Dari definisi menurut Cohen dan Robbins diatas dapat dijelaskan bahwa Green Accounting merupakan jenis akuntansi yang memasukkan biaya dan manfaat tidak langsung dari aktivitas ekonomi, seperti dampak lingkungan dan konsekuensi kesehatan dari perencanaan dan keputusan bisnis. sedangkan aktivitas dalam green accounting dijelaskan oleh (Cohen, N., 2011) sebagai berikut :

“Environmental accounting collects, analyzes, assesses, and prepares reports of both environmental and financial data with a view toward reducing environmental effect and costs. This form of accounting is central to many aspects of governmental policy as well. Consequently, environmental accounting has become a key aspect of green business and responsible economic development”

Menurut (Sulistiawati & Dirgantari, 2017) tujuan dari *green accounting* adalah untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan lingkungan dengan melakukan penilaian kegiatan lingkungan dari sudut pandang biaya (*environmental costs*) dan manfaat atau efek (*economic benefit*). *Green accounting* diterapkan oleh berbagai perusahaan untuk menghasilkan penilaian kuantitatif tentang biaya dan dampak perlindungan lingkungan (*environmental protection*).

Penerapan dan pengembangan *green accounting* memiliki beberapa maksud dan tujuan yang sangat signifikan terhadap lingkungan, yaitu :

1. Mendorong pertanggung jawaban entitas dan meningkatkan transparansi lingkungan.
2. Membantu entitas dalam menetapkan strategi untuk menanggapi isu lingkungan hidup dalam konteks hubungan entitas dengan masyarakat dan terlebih dengan kelompok-kelompok penggiat (activist) atau penekan (pressure group) terkait isu lingkungan.
3. Memberikan citra yang lebih positif sehingga entitas dapat memperoleh dana dari kelompok dan individu, seiring dengan tuntutan etis dari investor yang semakin meningkat.
4. Mendorong konsumen untuk membeli produk hijau dan dengan demikian membuat entitas memiliki keunggulan pemasaran yang lebih kompetitif dibandingkan dengan entitas yang tidak melakukan pengungkapan.
5. Menunjukkan komitmen entitas terhadap usaha perbaikan lingkungan hidup.
6. Mencegah opini negatif publik mengingat perusahaan yang berusaha pada area yang berisiko tidak ramah lingkungan pada umumnya akan menerima tantangan dari masyarakat.

Menurut terdapat tiga karakteristik kualitatif khusus dari informasi akuntansi hijau yang sangat bermanfaat dalam evaluasi penilaian pengambilan keputusan bagi para pemakai yaitu sebagai berikut:

1. Akuntabilitas, yaitu informasi akuntansi yang disajikan memperhitungkan semua aspek informasi entitas yang berkaitan dengan tanggung jawab ekonomi, sosial, serta biaya-manfaat dari dampak yang ditimbulkan.
2. Terintegrasi dan Komprehensif, yaitu informasi akuntansi yang disajikan merupakan hasil integrasi antara informasi akuntansi keuangan dengan

informasi akuntansi sosial dan lingkungan yang disajikan secara komprehensif dalam satu paket pelaporan akuntansi.

3. Transparan, yaitu informasi akuntansi terintegrasi harus disajikan secara jujur, akuntabel, dan transparan agar tidak menyesatkan para pihak dalam evaluasi, penilaian, dan pengambilan keputusan ekonomi dan non ekonomi.

Menurut (Lako, 2011), secara umum, komponen-komponen Laporan Akuntansi Hijau atau Laporan Keuangan Hijau tidak jauh berbeda dengan komponen-komponen laporan keuangan dalam akuntansi keuangan konvensional yang selama ini menjadi basis dan digunakan dalam IAS-IFRS dan SAK. Yaitu asset, liabilitas, ekuitas pemilik, pendapatan, biaya, dan laba.

Mengenai pengukuran dalam akuntansi lingkungan, Menurut (Lako, 2011:78) belum terdapat pengukuran secara pasti untuk merumuskan bagaimana metode pengukuran, penilaian, pengungkapan, dan penyajian akuntansi lingkungan di sebuah perusahaan. Pengukuran akuntansi lingkungan yang baik akan berakibat pada kinerja lingkungan yang baik juga. Pengukuran *green accounting* ini dapat dilihat dari kinerja lingkungan perusahaan.

Biaya lingkungan (*enviromental cost*) merupakan salah satu beberapa tipe biaya yang dikorbankan seperti halnya perusahaan memberikan barang dan jasa kepada konsumen. Kinerja lingkungan merupakan salah satu dari beberapa ukuran penting tentang keberhasilan perusahaan.

Beberapa alasan manajemen perlu memperhatikan biaya lingkungan dan kinerja lingkungan, antara lain :

1. Beberapa biaya lingkungan dapat dikurangi dan dieliminasi secara signifikan sebagai hasil dari keputusan bisnis, mulai dari operasi perubahan pergudangan,

investasi dalam teknologi pemrosesan yang lebih hijau, meredesain proses atau produk.

2. Biaya lingkungan (misalnya penghematan biaya lingkungan secara potensial) dapat dikaburkan dalam akun biaya overhead atau bahkan diabaikan.
3. Beberapa perusahaan telah menemukan bahwa biaya lingkungan dapat dioffset dengan perolehan pendapatan melalui penjualan limbah, produk sampingan atau cadangan polusi yang dipindahkan atau lisensi teknologi untuk penjumlahan.
4. Manajemen biaya lingkungan yang lebih baik dapat dihasilkan dengan mengembangkan kinerja lingkungan dan memperoleh manfaat yang signifikan terhadap kesehatan manusia seperti halnya dalam keberhasilan bisnis.
5. Dengan biaya lingkungan dan kinerja lingkungan, pemrosesan dan produk dapat memperbaiki penetapan biaya produk dan penetapan harga yang lebih tepat dan dapat membantu perusahaan dalam mendesain pemrosesan, produk, dan jasa yang lebih ramah lingkungan di masa depan.
6. Keunggulan kompetitif terhadap pelanggan dapat dihasilkan dari pemrosesan, produk, dan jasa yang dapat dijelaskan dengan lingkungan yang lebih baik.
7. Akuntansi biaya dan kinerja lingkungan dapat mendukung pengembangan perusahaan dan operasi sistem manajemen lingkungan secara menyeluruh.

Pengukuran kinerja lingkungan di Indonesia menggunakan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan (PROPER) yang dibuat oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Program ini bertujuan untuk mendorong kesadaran perusahaan untuk menaati peraturan, melakukan penataan terhadap pengelolaan lingkungan, meningkatkan kinerja pengelolaan lingkungan secara berkelanjutan, dan meningkatkan komitmen para *stakeholder* dalam upaya pelestarian lingkungan.

Sehingga program ini merupakan salah satu upaya perusahaan dalam meningkatkan environmental performance yang akan mempengaruhi pada peningkatan kinerja perusahaan (Hamidi, 2019).

2.2.5 *Good Corporate Governance*

Dalam (Forum Corporate Governance Indonesia (FCGI), 2003) merumuskan *corporate governance* sebagai sistem tata kelola perusahaan yang menjelaskan tentang hubungan antara berbagai partisipan dalam suatu perusahaan yang dapat menentukan arah dan kinerja perusahaan.

Tujuan *Corporate Governance* yaitu menciptakan nilai tambahan bagi semua pihak yang berkepentingan. *Corporate Governance* adalah suatu tata kelola perusahaan yang didasarkan pada teori keagenan. *Corporate Governance* diharapkan dapat menghadapi *agency problems* dengan memberi suatu keyakinan kepada para pemegang saham bahwa mereka akan menerima *return* atas dana yang telah diinvestasikan (Hamidi, 2019).

Corporate governance merupakan suatu proses dan struktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan dan kontinuitas usaha. Terdapat pengertian *corporate governance* yang dikeluarkan oleh beberapa pihak dalam *shareholder* dan *stakeholder*, namun pada umumnya menuju maksud dan pengertian yang sama (Rosiana, Astri & Mahardika, 2020).

Ada lima prinsip *Good Corporate Governance* dalam (KNKG, 2013) meliputi :

1. Keterbukaan (*Transparency*)

Keterbukaan kepada *stakeholders* dalam melakukan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan suatu informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Informasi mengenai laporan keuangan, kinerja keuangan, kepemilikan, dan pengelolaan perusahaan harus diungkapkan secara adil, akurat, tepat dan waktu agar pemegang saham dan pihak lainnya dapat mengetahui keadaan perusahaan.

2. Akuntabilitas (*Accountability*)

Kejelasan fungsi, struktur, sistem pengendalian, pelaksanaan dan pertanggung jawaban organ perusahaan sehingga pengelolaan dan keseimbangan kekuasaan antara *stakeholders* terlaksana secara efektif yang didasarkan pada keseimbangan kewenangan antara Para anggota eksekutif seperti komisaris, direksi, dan jajarannya wajib memiliki integritas untuk menjalankan usaha sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

3. Pertanggung jawaban (*Responsibility*)

Kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip korporasi yang sehat. Prinsip ini menuntut agar seluruh jajaran perusahaan untuk melakukan tugasnya dengan bertanggung jawab dan mematuhi hukum yang ditetapkan.

4. Kemandirian (*Independency*)

Suatu keadaan perusahaan yang dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari berbagai pihak manajemen yang tidak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.

5. Keadilan (*fairness*)

Keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak stakeholders yang di timbulkan berdasarkan suatu perjanjian serta peraturan perundangan yang berlaku.

Jika prinsip-prinsip GCG di atas dapat dilaksanakan secara sungguh-sungguh, dapat diartikan perusahaan akan memiliki landasan kokoh dalam menjalankan bisnisnya.

Menurut (Mulyasari, dkk., 2017), mekanisme GCG dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu internal dan eksternal. Mekanisme internal GCG merupakan mekanisme yang berada di dalam perusahaan. Mekanisme pengendalian yang melibatkan pihak internal perusahaan contohnya kepemilikan saham, dewan komisaris, dewan direksi, sekretaris, dan karyawan. Mekanisme eksternal GCG merupakan pengendalian yang berasal dari eksternal perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat diantaranya auditor eksternal, dan institusi keuangan sebagai kreditor dalam pemberi pinjaman dana.

Manfaat mekanisme GCG antara lain:

1. Mengurangi *agency cost* yang merupakan biaya yang harus ditanggung pemegang saham karena penyalahgunaan wewenang sebagai akibat pendelegasian wewenang kepada pihak manajemen.
2. Mengurangi biaya modal (*cost of capital*) sebagai dampak dari menurunnya tingkat bunga atas dana dan sumber daya yang dipinjam oleh perusahaan seiring dengan turunnya tingkat risiko perusahaan.

3. Menciptakan dukungan para *stakeholder* dalam lingkungan perusahaan tersebut terhadap keberadaan dan berbagai strategi dan kebijakan yang ditempuh perusahaan.

Menurut (Sugiarti, 2019) terdapat beberapa organ internal Good Corporate Governance yaitu direksi, dewan komisaris, dan komite audit.

2.2.5.1. Direksi

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja pasal 1 mengemukakan bahwa :

“Direksi adalah Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar”

Fungsi, wewenang, dan tanggung jawab direksi diatur dalam UU No. 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Dewan/direksi memiliki tugas antara lain:

1. Memimpin perusahaan dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan perusahaan.
2. Memilih, menetapkan, mengawasi tugas karyawan dan kepala bagian (manajer).
3. Menyetujui anggaran tahunan perusahaan.
4. Menyampaikan laporan kepada pemegang saham atas kinerja perusahaan.

2.2.5.2. Dewan Komisaris

Menurut Undang Undang Republik Indonesia No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja Pasal 1 mengemukakan bahwa :

“dewan komisaris (dewan pengawas) adalah organ perusahaan yang menjalankan tugas pengawasan secara umum dan/ atau khusus sesuai dengan anggaran dasar yang telah ditetapkan perusahaan serta memberikan nasihat kepada direksi”.

Menurut UU Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007 mengemukakan bahwa wewenang, tugas, dan tanggung jawab dewan komisaris dalam perusahaan, antara lain:

1. Melakukan tugas dan tanggung jawab dalam pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, dan memberikan nasehat kepada direksi.
2. Bertanggung jawab secara pribadi atas kerugian perseroan apa bila yang bersangkutan bersalah atau lalai dalam menjalankan tugasnya.
3. Bertanggung jawab secara pribadi atas kapalitan perseroan apa bila disebabkan oleh kesalahan dan kelalaian dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasehat.
4. Diberikan wewenang untuk membentuk komite yang diperlukan untuk mendukung tugas dewan komisaris.

2.2.5.3. Komite Audit

Suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang di bentuk oleh dewan komisaris dan, dengan demikian, tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris (atau dewan pengawas) dalam menjalankan fungsi pengawasan (*oversight*) atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit dan implementasi dari corporate governance di perusahaan-perusahaan (Septiani, 2013 dalam Sugiarti, 2019).

Menurut (KNKG, 2013), pada umumnya komite audit bertanggung jawab terhadap 3 bidang, yaitu :

1. Laporan Keuangan (*Financial Reporting*). Dalam hal pelaporan keuangan komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa laporan keuangan

yang dibuat manajemen telah memberikan gambaran yang sebenarnya tentang kondisi keuangan, hasil usaha, rencana dan komitmen perusahaan jangka panjang

2. Tata Kelola Perusahaan (*Corporate Governance*). Dalam bidang *corporate governance* komite audit bertanggung jawab untuk memastikan bahwa perusahaan telah dijalankan sesuai undang-undang dan peraturan yang berlaku dan etika, melaksanakan pengawasan secara efektif terhadap benturan kepentingan dan kecurangan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan.
3. Pengawasan Perusahaan (*Corporate Control*). Komite Audit bertanggung jawab untuk pengawasan perusahaan termasuk didalamnya hal-hal yang berpotensi mengandung risiko dan sistem pengendalian intern serta memonitor proses pengawasan yang dilakukan oleh auditor internal.

2.2.6 Kinerja Keuangan

Menurut (Supit & Thessalonica 2015), kinerja keuangan adalah alat untuk mengukur prestasi kerja keuangan perusahaan melalui struktur permodalannya. Tolak ukur yang digunakan dalam kinerja keuangan tergantung pada posisi perusahaan. Penilaian kinerja keuangan harus diketahui output maupun inputnya. Output adalah hasil dari suatu kinerja karyawan, sedangkan input adalah hasil dari suatu keterampilan yang digunakan untuk mendapatkan hasil tersebut.

Menurut (Hamidi, 2019) kinerja keuangan perusahaan merupakan satu diantara penilaian mengenai kondisi keuangan perusahaan yang dilakukan berdasarkan analisis terhadap rasio keuangan perusahaan. Tujuan penilaian kinerja keuangan menurut (Setiawan, Okta dan Setiadi, 2020) yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui keberhasilan pengelolaan keuangan perusahaan terutama kondisi likuiditas, kecukupan modal, dan profitabilitas yang dicapai dalam tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.
2. Untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam mendayagunakan semua asset yang dimiliki dalam menghasilkan profit secara efisien.

Dengan demikian, untuk dapat memperoleh gambaran dan informasi tentang perkembangan kinerja keuangan perusahaan perlu mengadakan analisa atau interpretasi terhadap data keuangan dari perusahaan yang bersangkutan dan data keuangan itu akan tercermin di dalam laporan keuangan.

Menurut (Suryanto, 2019), dalam melakukan analisa atau interpretasi, dapat menggunakan dua macam perbandingan yaitu:

1. Membandingkan rasio sekarang dengan rasio-rasio yang lalu atau dengan rasio-rasio yang diperkirakan untuk waktu yang akan datang dari perusahaan yang sama.
2. Membandingkan rasio perusahaan dengan rasio-rasio sejenis dengan perusahaan lain yang sejenis dan pada waktu yang sama.

Menurut (Dewa, 2015) dalam (Setiawan, Okta dan Setiadi, 2020), ada 4 (empat) kelompok rasio keuangan yaitu rasio likuiditas, rasio aktivitas, rasio profitabilitas dan rasio solvabilitas.

1. Rasio likuiditas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan membiayai operasi dan memenuhi kewajiban keuangan pada saat ditagih.
2. Rasio aktivitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam melakukan aktivitas perusahaan sehari-hari atau kemampuan perusahaan dalam penjualan, penagihan piutang maupun pemanfaatan aktiva yang dimiliki.

3. Rasio profitabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba dari berbagai kebijakan dan keputusan yang telah diambil.
4. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengukur seberapa jauh aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang.

Apabila dilihat dari sumber dari mana rasio ini dibuat, maka dapat digolongkan dalam 3 (tiga) golongan, yaitu:

1. Rasio neraca (*balance sheet ratios*), yang digolongkan dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari atau bersumber dari neraca
2. Rasio-rasio laporan laba-rugi (*income statement ratios*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari laba-rugi.
3. Rasio-rasio antar laporan (*interstatement ratios*), yang tergolong dalam kategori ini adalah semua data yang diambil dari neraca dan laporan laba-rugi.

Rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur kinerja keuangan adalah *Return on Asset (ROA)*. *Return on Asset (ROA)* adalah suatu ukuran yang menilai kemampuan perusahaan untuk menghasilkan keuntungan dari asetnya (Fadillah, 2017). Dimana dijelaskan bahwa Semakin tinggi ROA perusahaan, semakin efisien pula penggunaan aset dan keuntungan yang diperoleh akan semakin tinggi. Jika di sisi lain ROA negatif, maka perusahaan berada dalam situasi kerugian. Dimana ini berarti bahwa jumlah total yang diinvestasikan belum menghasilkan keuntungan apapun (Saifi, 2019).

2.3 Hubungan Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh *Green Accounting* dengan Kinerja Keuangan Perusahaan

Menurut (Hamidi, 2019), dalam penerapan *Green Accounting*, perusahaan melakukan berbagai upaya pengelolaan dan pelestarian lingkungan untuk mencapai kinerja lingkungan yang hijau dan baik. Pengungkapan biaya lingkungan dapat meningkatkan citra positif perusahaan karena menandakan bahwa perusahaan peduli akan lingkungan sekitarnya.

Dijelaskan oleh (Wulaningrum & Kusilandayani 2020) bahwa biaya lingkungan atau *environmental cost* adalah biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan sebagai akibat adanya sistem pengelolaan lingkungan yang buruk disebabkan karena proses produksi perusahaan yang buruk. Biaya lingkungan meliputi biaya yang berhubungan dengan proses-proses yang berdampak pada lingkungan dan biaya yang berhubungan dengan perbaikan kerusakan akibat limbah yang ditimbulkan dalam kegiatan perusahaan.

Biaya lingkungan dapat dilihat pada alokasi dana untuk program bina lingkungan yang tercantum dalam laporan tahunan atau laporan keuangan perusahaan. Biaya lingkungan ditung dengan membandingkan dana program bina lingkungan dengan laba bersih yang dihasilkan oleh perusahaan.

Semakin besar biaya lingkungan maka citra positif perusahaan semakin baik sehingga akan meningkatkan loyalitas para konsumen terhadap produk-produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Selain itu, menjaga loyalitas para pekerja sehingga produktivitas perusahaan dalam meningkatkan penjualan semakin baik

dan menarik investor untuk berinvestasi di perusahaan tersebut yang akan berdampak pada peningkatan kinerja keuangan perusahaan.

Hasil penelitian oleh (Nababan, Lastri Meito & Hasyir, 2019) dan (Okafor, 2017) yang menyatakan semakin tinggi biaya lingkungan atau *environmental cost* perusahaan akan meningkatkan kinerja keuangan perusahaan dan semakin baik *environmental performance* perusahaan akan meningkatkan *financial performance* perusahaan.

H1 : *Green Accounting* berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.3.2 Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap kinerja keuangan

Menurut (Suryanto, 2019), faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan antara lain *Good Corporate Governance* (GCG). Karena prinsip-prinsip dari GCG pada dasarnya memiliki tujuan untuk memberikan kemauan terhadap kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Semakin baik *corporate governance* yang dimiliki suatu perusahaan maka diharapkan semakin baik pula kinerja dari suatu perusahaan tersebut.

Good Corporate Governance merupakan salah satu elemen kunci dalam meningkatkan efisiensi ekonomis, yang meliputi serangkaian hubungan antara manajemen perusahaan, dewan direksi, para pemegang saham, dan stakeholders lainnya.

2.3.1. Dewan Direksi

Menurut (Rahmawati, 2017), peran dewan direksi sangat penting dalam menentukan arah kebijakan perusahaan. Perencanaan strategis yang dibuat oleh dewan direksi sangat menentukan dalam peningkatan kinerja suatu perusahaan.

Dengan adanya dewan direksi dalam perusahaan maka akan meningkatkan kinerja perusahaan.

Menurut (Wardati dkk., 2021), frekuensi rapat dewan diyakini mempengaruhi kinerja keuangan perusahaan. Dalam rapat dewan memiliki banyak waktu untuk bertukar, berdiskusi, dan berbagi ide, merencanakan strategi untuk perusahaan untuk menyelesaikan masalah besar perusahaan serta menentukan arah dan operasional perusahaan.

Hasil penelitian (Prasetio, E., & Rinova, 2021) menunjukkan bahwa frekuensi rapat dewan direksi berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan perusahaan sejalan dengan penelitian (Sejati, 2018) dihasilkan bahwa frekuensi rapat dewan direksi secara parsial berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Artinya, dewan direksi mampu menerapkan GCG dalam perusahaan, mampu bermusyawarah dalam proses pengambilan keputusan dalam perusahaan demi peningkatan kinerja perusahaan.

H2 : dewan direksi berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.3.2. Dewan Komisaris

Menurut (Retno & Bambang, 2021), dewan komisaris merupakan anggota dewan direksi yang bersifat independen dan tidak memihak ke pihak manapun sehingga tidak dapat dipengaruhi. Dewan komisaris memiliki peran sangat penting dalam perusahaan karena dapat meminimalisir adanya tindak manajemen perusahaan yang tidak bersih dan tidak transparan, dengan adanya dewan komisaris ini mampu untuk meminimalisir masalah yang sering terjadi antara prinsipal dan manajemen dalam perusahaan, maka diharapkan dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang baik. Dengan terciptanya tata

kelola perusahaan yang baik, maka akan tercipta pengelolaan usaha yang baik dan akan terjadi peningkatan dalam kinerja perusahaan.

(Wardati dkk., 2021) menjelaskan bahwa semakin tinggi dewan komisaris di dalam perusahaan maka semakin baik. Karena semakin banyak yang memonitor tingkah laku manajemen sehingga akan selalu bertindak sesuai dengan keinginan pemegang saham.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Rahmawati, 2017) yang menyatakan bahwa dewan komisaris memiliki pengaruh yang positif terhadap kinerja keuangan perusahaan, sedangkan juga (Seriawan, Okta dan Setiadi, 2020) menyatakan bahwa komisaris berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Ini menunjukkan bahwa dewan komisaris mampu untuk meningkatkan GCG dalam perusahaan sehingga memberikan dampak yang positif terhadap kinerja keuangan.

H3 : dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.3.3. Komite Audit

Menurut (Wardati dkk., 2021), Komite audit merupakan suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris. Komite audit berperan sebagai pengawas untuk meningkatkan kontrol internal, profitabilitas, efisiensi, dan kepercayaan investor pada perusahaan.

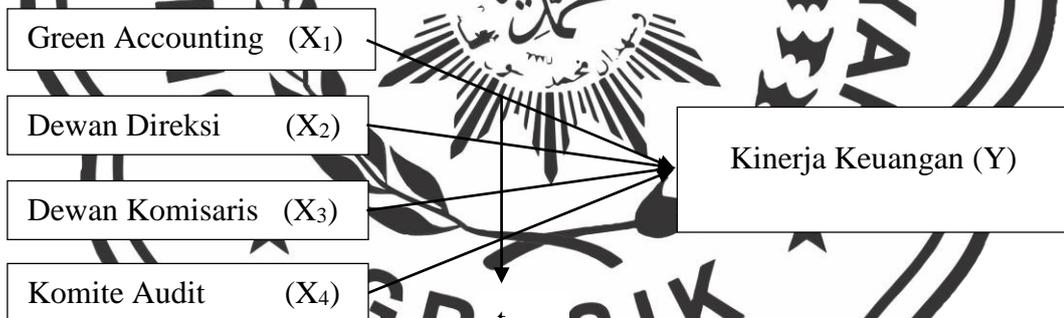
Menurut (Wardati dkk., 2021), Semakin banyak jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan akan memberikan perlindungan dan kontrol yang lebih baik terhadap proses akuntansi dan keuangan yang pada akhirnya akan memberikan pengaruh yang baik bagi kinerja keuangan perusahaan.

Hal tersebut sejalan dengan penelitian (Mulyati, 2021) menunjukkan bahwa komite audit secara simultan maupun parsial, komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Penelitian lain juga dilakukan oleh (Wardati dkk., 2021) menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh terhadap kinerja keuangan perusahaan. Ini menunjukkan bahwa komite audit dapat bekerjasama dengan perusahaan dalam meningkatkan kinerja keuangan perusahaan.

H4 : Komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

2.4 Kerangka Penelitian

Untuk membantu memahami variabel yang mempengaruhi kinerja keuangan, diperlukan suatu kerangka pemikiran. Dari tinjauan pustaka yang telah dijelaskan diatas, disusunlah hipotesis yang merupakan alur pemikiran peneliti, kemudian digambarkan kerangka pemikiran seperti berikut ini :



Gambar 2.1
Kerangka Konseptual